

## **PERBANDINGAN KINERJA INDUSTRI MAKANAN HALAL INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA UTAMA EKONOMI ISLAM**

**Mustofa Mahfudz Fauzi<sup>1</sup>, Danish Zulfan Al-fathan<sup>2</sup>, Hikmah Dzilhijjah<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> [mustofamahfudz9@gmail.com](mailto:mustofamahfudz9@gmail.com)

<sup>2</sup> [danish.dzaff@gmail.com](mailto:danish.dzaff@gmail.com)

<sup>3</sup> [hikmahdzc07@gmail.com](mailto:hikmahdzc07@gmail.com)

### **Informasi artikel**

Diterima :

17 Desember 2025

Direvisi :

06 Januari 2026

Disetujui :

26 Januari 2026

### **ABSTRACT**

*This study aims to compare the performance of Indonesia's halal food industry with that of major Islamic economic countries based on the State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/25. Using literature review and secondary data analysis, this study positions Indonesia in the halal food sector, identifying the driving factors, and identifying obstacles to improving global competitiveness. The results show that Indonesia ranks third in the Global Islamic Economic Indicator (GIEI), but still lags behind Malaysia and Saudi Arabia in terms of exports, industrial innovation, and the strength of its halal ecosystem. This study provides strategic recommendations to strengthen Indonesia's competitiveness through strengthening halal certification, supply chain digitalization, and the development of halal industrial parks.*

**Keywords:** Halal food, SGIE 2024/25, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, halal industry.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Islam global menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama pada sektor makanan halal yang menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran konsumen Muslim dunia. Menurut SGIE Report 2024/25, konsumsi global sektor makanan halal oleh konsumen Muslim mencapai US\$ 1,43 triliun pada 2023 dan diperkirakan naik menjadi US\$ 1,94 triliun pada 2028, meningkatnya kesadaran halal, serta berkembangnya standar keamanan pangan internasional (Fortune Indonesia, 2025). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri makanan halal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja ekspor dan daya saing global, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara utama ekonomi Islam seperti Malaysia dan Arab Saudi yang secara konsisten menempati posisi teratas dalam indikator ekonomi Islam global (Huda & Heykal, 2019).



MRBEST is licensed  
under CC BY-SA 4.0

Isu pokok dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara potensi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dengan realisasi kinerja industri makanan halal yang masih tertinggal dari negara-negara pesaing. Malaysia unggul melalui sistem sertifikasi halal JAKIM yang diakui internasional dan ekosistem industri yang matang (Lubis, 2020), sementara Arab Saudi memiliki kekuatan pada sektor daging halal dan logistik yang terintegrasi (Nabila, 2023). Sebaliknya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti efisiensi sertifikasi halal, rendahnya nilai ekspor makanan halal, keterbatasan inovasi industri, serta belum optimalnya pengembangan kawasan industri halal (Fathurrahman, 2022). Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai posisi kompetitif Indonesia dalam peta industri halal global dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan Indonesia untuk mempercepat transformasi industri halal agar mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah telah menargetkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, namun pencapaian target tersebut memerlukan pemahaman mendalam mengenai posisi Indonesia saat ini, faktor penghambat, serta pembelajaran dari negara-negara yang telah berhasil membangun ekosistem halal yang kuat (Maulana, 2021). Dengan meningkatnya persaingan global dan semakin ketatnya standar halal internasional, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja Indonesia dan arah pengembangan yang perlu ditempuh (Setiawan, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis posisi Indonesia dalam industri makanan halal berdasarkan SGIE Report 2024/25;
2. Membandingkan kinerja Indonesia dengan Malaysia dan Arab Saudi sebagai negara utama ekonomi Islam;
3. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat daya saing Indonesia; serta
4. Merumuskan strategi penguatan industri makanan halal Indonesia agar mampu bersaing secara global (Sari & Yuliani, 2021).

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur dan analisis komparatif terhadap data SGIE 2024/25 pada beberapa negara utama (Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, dan UAE) untuk mengidentifikasi perbedaan kinerja sektor halal antar negara, jurnal ilmiah, serta laporan industri halal. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama, membandingkan keunggulan dan kelemahan Indonesia dengan negara pembanding, serta menyusun rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya (Wulandari, 2023). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan industri makanan halal Indonesia di masa depan (Hamzah, 2021).

## KAJIAN LITERATUR

### Teori yang Berkaitan

#### Teori Ekonomi Halal

Ekonomi halal merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berakar pada prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan dalam literatur fikih muamalah. Dalam kajian akademik modern, konsep ini diperluas oleh Wilson (2014) melalui karyanya *The Halal Phenomenon*, yang menekankan bahwa halal tidak hanya dipahami sebagai aspek religius, tetapi juga sebagai standar kualitas dan keamanan pangan yang diakui secara global. Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi halal mencakup seluruh proses produksi, distribusi, konsumsi, dan logistik yang sesuai dengan syariah, sehingga produk halal dapat diterima baik di negara mayoritas Muslim maupun di pasar internasional.

#### Teori Daya Saing Industri

Daya saing industri merujuk pada kemampuan suatu negara atau sektor untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global. Porter (meskipun tidak dikutip langsung dalam referensi) menjelaskan bahwa daya saing dipengaruhi oleh faktor-faktor

seperti inovasi, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, dan kemampuan ekspor. Dalam konteks industri halal, daya saing juga dipengaruhi oleh kekuatan sertifikasi halal, pengakuan internasional, dan kemampuan negara dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi (Huda & Heykal, 2019). Negara seperti Malaysia berhasil membangun daya saing melalui sertifikasi JAKIM yang diakui global, sementara Arab Saudi unggul dalam logistik halal dan ekspor daging.

### **Teori Ekosistem Halal**

Konsep ekosistem halal dikembangkan oleh Halal Development Corporation (HDC) Malaysia sejak 2006 dan diperkuat dalam kajian akademik oleh Lubis (2020). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan industri halal tidak hanya bergantung pada satu aspek, melainkan pada integrasi seluruh komponen yang mendukungnya, mulai dari regulasi, lembaga sertifikasi, kawasan industri halal, hingga pasar konsumen. Negara dengan ekosistem halal yang matang, seperti Malaysia dan Arab Saudi, terbukti memiliki kinerja lebih baik dibandingkan Indonesia yang masih dalam tahap penguatan ekosistem.

### **Teori Digitalisasi Industri Halal**

Digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan industri halal modern. Teknologi seperti blockchain, Internet of Things (IoT), dan sistem informasi halal dapat meningkatkan transparansi rantai pasok, mempercepat proses sertifikasi, dan memperluas akses pasar (Wulandari, 2023). Digitalisasi juga memungkinkan pelaku UMKM halal untuk bersaing secara global melalui platform e-commerce dan marketplace halal. SGIE Report 2024/25 menekankan bahwa digitalisasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan industri halal global.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai industri halal, khususnya sektor makanan halal, telah dilakukan oleh berbagai peneliti baik di Indonesia maupun di tingkat global. Kajian-kajian ini memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dalam industri halal, tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran dari negara-negara yang telah berhasil membangun ekosistem halal yang kuat. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

### **Penelitian tentang daya saing industri halal**

Huda & Heykal (2019) melakukan penelitian komprehensif mengenai daya saing industri halal Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis kompetitif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, daya saing industri halalnya masih tertinggal dari Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Faktor utama yang menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia adalah keterbatasan inovasi produk, rendahnya kualitas standar industri, serta belum optimalnya dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat struktur industri agar mampu bersaing di pasar global.

### **Penelitian tentang sertifikasi halal dan regulasi**

Fathurrahman (2022) meneliti efektivitas implementasi sertifikasi halal di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Penelitian tersebut menemukan bahwa proses sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan auditor halal, lamanya proses verifikasi, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan industri halal nasional. Sebaliknya, Malaysia telah berhasil membangun sistem sertifikasi halal yang efisien dan diakui internasional melalui JAKIM (Lubis, 2020). Perbandingan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu faktor penentu daya saing industri makanan halal.

### **Penelitian tentang kawasan industri halal**

Pratiwi (2023) meneliti peran Kawasan Industri Halal (KIH) dalam meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor produk halal Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KIH dapat menjadi katalisator penting dalam pengembangan industri halal karena menyediakan fasilitas produksi yang terstandarisasi, infrastruktur logistik halal, serta dukungan regulasi yang lebih terintegrasi. Namun, implementasi KIH di Indonesia masih terbatas pada beberapa wilayah dan belum terhubung secara optimal dengan rantai pasok global. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi Indonesia dalam ekspor makanan halal.

### **Penelitian tentang logistik dan rantai pasok halal**

Ramadhan (2022) menyoroti pentingnya halal supply chain management dalam menjaga integritas produk halal dari hulu ke hilir. Penelitian tersebut menekankan bahwa rantai pasok halal harus memastikan tidak adanya kontaminasi silang dengan produk non-halal selama proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Arab Saudi menjadi contoh negara yang unggul dalam logistik halal, terutama pada sektor daging dan produk hewani (Nabila, 2023). Keunggulan logistik ini membuat Arab Saudi mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu eksportir utama produk halal di kawasan Timur Tengah.

### **Penelitian tentang digitalisasi industri halal**

Wulandari (2023) melakukan penelitian mengenai peran digitalisasi dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi sertifikasi halal, memperluas akses pasar UMKM halal, serta meningkatkan transparansi rantai pasok. Teknologi seperti blockchain dan IoT dapat digunakan untuk melacak kehalalan produk secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini sejalan dengan rekomendasi SGIE Report 2024/25 yang menekankan bahwa digitalisasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan industri halal global.

### **Penelitian tentang ekosistem halal global**

Hamzah (2021) meneliti perbandingan ekosistem halal di beberapa negara, termasuk Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa negara dengan ekosistem halal yang kuat cenderung memiliki kinerja lebih baik dalam industri halal global. Malaysia unggul dalam sertifikasi dan pengembangan industri, sementara Arab Saudi unggul dalam logistik dan ekspor daging. Indonesia, meskipun memiliki pasar domestik yang besar, masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Penelitian ini memperkuat urgensi penguatan ekosistem halal Indonesia agar mampu bersaing secara global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja industri makanan halal Indonesia dengan negara-negara utama ekonomi Islam berdasarkan State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/25. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap data sekunder yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk laporan internasional, jurnal ilmiah, buku, maupun dokumen kebijakan yang relevan dengan perkembangan industri halal global. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan kinerja antarnegara tanpa melakukan pengumpulan data primer.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai publikasi kredibel, seperti SGIE Report 2024/25 yang menjadi rujukan utama dalam pemetaan kinerja industri halal global. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah nasional yang membahas daya saing industri halal, sertifikasi halal, kawasan industri halal, digitalisasi industri, serta ekosistem halal di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Buku-buku terkait ekonomi Islam dan industri halal, laporan industri dari lembaga pemerintah seperti KNEKS, BPJPH, dan

Kemenkeu, serta regulasi yang mengatur sertifikasi halal di masing-masing negara turut menjadi bagian dari sumber data penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif untuk memastikan bahwa seluruh literatur yang dianalisis relevan dengan fokus penelitian.

Selain mengumpulkan data faktual dari berbagai sumber, penelitian ini juga memuat opini analitis berdasarkan interpretasi penulis terhadap temuan literatur. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai pandangan akademisi dan lembaga internasional mengenai posisi Indonesia dalam industri makanan halal, kekuatan dan kelemahan ekosistem halal nasional, serta faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia dan Arab Saudi unggul dalam indikator SGIE. Penelitian ini juga menyoroti aspek-aspek penting seperti sertifikasi halal, kapasitas ekspor, inovasi industri, digitalisasi rantai pasok, dan dukungan regulasi sebagai variabel yang memengaruhi daya saing industri makanan halal.

Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur, mengelompokkan informasi berdasarkan indikator SGIE, serta membandingkan kinerja Indonesia dengan Malaysia dan Arab Saudi secara sistematis. Analisis komparatif dilakukan untuk melihat perbedaan strategi, kebijakan, dan kekuatan ekosistem halal di masing-masing negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam industri makanan halal global serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing nasional.

Studi ini berfokus pada pengembangan wacana konseptual mengenai industri makanan halal, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti survei atau wawancara. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi halal serta kontribusi praktis bagi pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi penguatan industri makanan halal Indonesia. Dengan pendekatan literatur yang komprehensif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam mencapai posisi sebagai pusat industri halal dunia.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Posisi Indonesia dalam Ekosistem Industri Halal Global

Hasil analisis terhadap State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/25 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Peringkat ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki ekosistem halal yang berkembang, namun belum sekuat Malaysia dan Arab Saudi. Malaysia mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global berkat konsistensi kebijakan, integrasi industri halal, serta penguatan lembaga seperti Halal Development Corporation (HDC) yang berperan dalam memperluas jejaring industri halal internasional (Rahim, 2022). Sementara itu, Arab Saudi mengoptimalkan posisinya sebagai pusat logistik halal di kawasan Timur Tengah melalui penguatan infrastruktur dan kebijakan ekspor yang agresif (Al-Farouq, 2021).

Temuan ini sejalan dengan laporan KNEKS (2024) yang menyebutkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, ekosistem halal nasional masih menghadapi tantangan dalam integrasi regulasi, koordinasi antar lembaga, dan kesiapan industri. Penelitian oleh Hasanah (2023) juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap transisi menuju ekosistem halal yang matang, terutama dalam aspek sertifikasi, pengawasan, dan penguatan industri pendukung. Dengan demikian, posisi Indonesia dalam SGIE 2024/25 mencerminkan adanya peluang besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan.

## Perbandingan Kinerja Ekspor Makanan Halal

Tabel 1. Data SGIE 2024/25

| Indikator SGIE 2024/25                 | Indonesia                         | Malaysia                              | Arab Saudi                               |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Peringkat GIEI Global</b>           | 3                                 | 1                                     | 2  |
| <b>Ekspor Halal Food</b>               | Rendah, belum masuk 10 besar      | Tinggi, masuk 5 besar dunia           | Tinggi, unggul pada daging halal         |
| <b>Kekuatan Sertifikasi Halal</b>      | Sedang (BPJPH masih berkembang)   | Sangat kuat (JAKIM diakui global)     | Kuat (SFDA ketat pada impor/ekspor)      |
| <b>Inovasi Industri</b>                | Sedang, didominasi UMKM           | Tinggi, didukung HDC & industri besar | Tinggi pada sektor peternakan & logistik |
| <b>Digitalisasi Rantai Pasok</b>       | Rendah–sedang                     | Tinggi (blockchain, IoT)              | Tinggi (logistik digital)                |
| <b>Dukungan Pemerintah</b>             | Tinggi, tetapi belum terintegrasi | Sangat tinggi & konsisten             | Tinggi, fokus pada ekspor                |
| <b>Kesiapan Kawasan Industri Halal</b> | Berkembang (KIH masih terbatas)   | Sangat siap & terintegrasi            | Siap, terutama sektor daging             |
| <b>Potensi Pasar Domestik</b>          | Sangat besar                      | Sedang                                | Sedang                                   |

Sumber: Diolah dari SGIE Report 2024/25

Data SGIE 2024/25 menunjukkan bahwa Malaysia dan Arab Saudi memiliki kinerja ekspor makanan halal yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Malaysia berhasil masuk dalam lima besar eksportir makanan halal dunia berkat dukungan kebijakan ekspor yang terstruktur dan keberhasilan industri dalam memenuhi standar halal internasional (Yusof & Othman, 2020). Arab Saudi, di sisi lain, memanfaatkan kekuatan sektor peternakan dan logistik untuk menjadi eksportir utama produk daging halal ke berbagai negara, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika (Al-Mutairi, 2022). Kedua negara ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga pada efektivitas kebijakan dan kesiapan industri.

Indonesia, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, belum mampu menembus pasar global secara signifikan. Laporan Kementerian Perdagangan (2024) menyebutkan bahwa ekspor makanan halal Indonesia masih terkonsentrasi pada produk olahan dasar dan belum banyak masuk ke kategori produk bernilai tambah tinggi. Penelitian oleh Suryani (2023) juga menegaskan bahwa rendahnya ekspor halal food Indonesia disebabkan oleh keterbatasan sertifikasi halal internasional, kurangnya inovasi produk, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat strategi ekspor agar dapat bersaing dengan negara-negara utama ekonomi Islam.

### Sertifikasi Halal sebagai Faktor Penentu Daya Saing

Tabel 2. BPJPH Tahun 2024

| Aspek Sertifikasi | Indonesia (BPJPH) | Malaysia (JAKIM) | Arab Saudi (SFDA) |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Pengakuan Global  | Sedang            | Sangat tinggi    | Tinggi            |
| Kecepatan Proses  | Sedang–lambat     | Cepat            | Cepat             |
| Jumlah Auditor    | Terbatas          | Memadai          | Memadai           |



| Aspek Sertifikasi  | Indonesia (BPJPH) | Malaysia (JAKIM) | Arab Saudi (SFDA) |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Integrasi Industri | Sedang            | Sangat kuat      | Kuat              |
| Standar Teknis     | Baik              | Sangat baik      | Sangat baik       |
| Tantangan Utama    | SDM & proses      | Menjaga standar  | Pengawasan impor  |

Sumber: BPJPH (2024)

Sertifikasi halal merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan daya saing industri makanan halal. Malaysia unggul karena sertifikasi JAKIM telah diakui secara global dan menjadi rujukan internasional dalam penetapan standar halal (Kasim, 2021). Keberhasilan Malaysia dalam membangun sistem sertifikasi yang kredibel tidak terlepas dari konsistensi kebijakan pemerintah dan integrasi lembaga sertifikasi dengan industri. Arab Saudi juga memperkuat sistem sertifikasi halalnya melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA), yang berperan dalam memastikan standar halal diterapkan secara ketat pada produk impor dan ekspor (Al-Harbi, 2022).

Indonesia, melalui BPJPH, telah berupaya memperkuat sistem sertifikasi halal nasional. Namun, penelitian oleh Dewi (2023) menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan auditor, lamanya proses verifikasi, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi. Selain itu, laporan BPJPH (2024) menyebutkan bahwa tingkat sertifikasi halal UMKM masih rendah karena kendala biaya dan akses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi halal Indonesia sudah kuat, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara lain.

### Digitalisasi dan Inovasi Industri Halal

Digitalisasi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri halal global. Malaysia dan Arab Saudi telah mengintegrasikan teknologi seperti blockchain, IoT, dan sistem pelacakan digital untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal (Rahman & Salleh, 2022). Teknologi ini memungkinkan konsumen dan regulator untuk memverifikasi kehalalan produk secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk halal di pasar internasional. Penelitian oleh Abdullah (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi juga mempercepat proses sertifikasi halal dan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi standar halal internasional.

Indonesia mulai mengadopsi digitalisasi dalam industri halal, namun implementasinya masih terbatas. Laporan KNEKS (2024) menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM halal belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam proses produksi maupun pemasaran. Penelitian oleh Putra (2023) juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam digitalisasi industri halal Indonesia. Dengan demikian, digitalisasi menjadi area strategis yang perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri makanan halal global.

### Temuan Spesifik Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri makanan halal, namun masih menghadapi kesenjangan antara potensi dan realisasi. Salah satu temuan spesifik adalah bahwa Indonesia unggul dalam ketersediaan sumber daya alam dan pasar domestik, tetapi lemah dalam ekspor dan inovasi produk. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Mahmud (2022) yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat hilirisasi industri halal agar dapat meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing global.

Temuan unik lainnya adalah bahwa digitalisasi menjadi pembeda utama antara Indonesia dan negara-negara utama ekonomi Islam. Malaysia dan Arab Saudi telah memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memperkuat ekosistem halal, sementara Indonesia masih berada pada tahap awal digitalisasi. Penelitian oleh Zulkifli (2023) menunjukkan bahwa negara yang lebih cepat mengadopsi teknologi cenderung memiliki kinerja industri halal yang lebih

baik. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi merupakan faktor strategis yang perlu diprioritaskan oleh Indonesia.

### Kemungkinan Tindak Lanjut

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri makanan halal global. Pertama, Indonesia perlu mempercepat penguatan sertifikasi halal BPJPH agar dapat diakui secara internasional dan bersaing dengan JAKIM Malaysia. Kedua, pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) perlu dipercepat dan diperluas agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor. Ketiga, digitalisasi rantai pasok halal perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan IoT.

Selain itu, kolaborasi internasional dengan Malaysia dan Arab Saudi dapat menjadi strategi penting untuk transfer pengetahuan dan teknologi. Penelitian oleh Karim (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antarnegara dapat mempercepat pengembangan industri halal dan meningkatkan daya saing global. Dengan demikian, tindak lanjut ini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target sebagai pusat industri halal dunia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja industri makanan halal Indonesia dengan Malaysia dan Arab Saudi berdasarkan *State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal dunia, namun realisasi kinerjanya masih tertinggal dibandingkan dua negara utama ekonomi Islam tersebut. Malaysia menempati posisi teratas dalam indikator GIEI karena keberhasilan membangun ekosistem halal yang terintegrasi, konsistensi kebijakan pemerintah, serta kekuatan sertifikasi JAKIM yang telah diakui secara global. Arab Saudi berada pada posisi kedua dengan keunggulan pada sektor logistik halal, ekspor daging, dan penguatan standar halal melalui SFDA.

Indonesia berada pada posisi ketiga, menunjukkan bahwa negara ini memiliki fondasi yang kuat, terutama dari sisi regulasi halal, potensi pasar domestik, dan sumber daya alam. Namun, beberapa aspek masih menjadi hambatan utama, seperti rendahnya ekspor halal food, belum optimalnya digitalisasi rantai pasok, keterbatasan auditor halal, serta belum terintegrasi Kawasan Industri Halal (KIH) secara menyeluruh. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat strategi pengembangan industri halal agar mampu bersaing secara global.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian analisis komparatif yang lebih komprehensif melalui integrasi tabel-tabel indikator SGIE, perbandingan sertifikasi halal, digitalisasi industri, serta analisis SWOT yang secara spesifik memetakan posisi Indonesia dalam industri makanan halal global. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa digitalisasi merupakan faktor pembeda utama antara Indonesia dan negara pesaing, sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, kesiapan industri, dan daya saing global dalam konteks industri makanan halal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, namun diperlukan langkah strategis dan terukur untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Dengan memaksimalkan potensi pasar domestik, memperkuat sertifikasi halal, meningkatkan inovasi industri, dan mempercepat digitalisasi, Indonesia dapat memperbaiki posisinya dalam rantai pasok halal global dan meningkatkan kontribusi sektor halal terhadap perekonomian nasional.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan tindak lanjut oleh pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertama, Indonesia perlu memperkuat sistem sertifikasi halal BPJPH agar memiliki kredibilitas dan pengakuan internasional yang setara dengan JAKIM Malaysia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah auditor halal, penyederhanaan proses sertifikasi, serta digitalisasi layanan sertifikasi untuk mempercepat proses verifikasi dan meningkatkan transparansi.

Kedua, pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) perlu dipercepat dan diperluas. Pemerintah perlu memastikan bahwa KIH memiliki infrastruktur yang memadai, fasilitas produksi yang terstandarisasi, serta integrasi dengan logistik halal. KIH yang terintegrasi akan meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat daya saing ekspor, dan menarik investasi industri halal dari dalam maupun luar negeri.

Ketiga, digitalisasi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri halal Indonesia. Pemerintah dan pelaku industri perlu mendorong pemanfaatan teknologi seperti blockchain, Internet of Things (IoT), dan sistem pelacakan halal untuk meningkatkan transparansi rantai pasok dan kepercayaan konsumen global. Selain itu, UMKM halal perlu diberikan pelatihan literasi digital, akses teknologi, dan pendampingan agar mampu bersaing di pasar global.

Keempat, kolaborasi internasional dengan Malaysia dan Arab Saudi perlu diperkuat untuk transfer teknologi, peningkatan standar industri, dan perluasan pasar ekspor. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, harmonisasi standar halal, serta pengembangan rantai pasok halal regional yang saling terhubung.

Kelima, pelaku UMKM perlu diberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk akses pembiayaan, pelatihan inovasi produk, dan pendampingan pemasaran. UMKM merupakan tulang punggung industri halal Indonesia, sehingga peningkatan kapasitas UMKM akan berdampak signifikan terhadap daya saing nasional.

Akhirnya, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method untuk mengukur dampak kebijakan halal secara lebih empiris, atau memperluas analisis ke sektor halal lainnya seperti farmasi, kosmetik, dan pariwisata halal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga memberikan arah strategis bagi pengembangan industri halal Indonesia di masa depan.

## REFERENSI

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. New York: W. W. Norton & Company.

Dewi, R. (2023). Efektivitas sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia pasca UU JPH. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 145–160. <https://doi.org/10.20885/jesi.vol11.iss2.art5>

Hamzah, A. (2021). Membangun ekosistem halal berkelanjutan: Regulasi, digitalisasi, dan inovasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 33–47. <https://doi.org/10.21580/jebi.2021.7.1.7890>

Huda, N., & Heykal, M. (2019). Peta jalan industri halal di Indonesia: Upaya meningkatkan daya saing global. *Humanis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Islam*, 3(4), 988–1005. <https://doi.org/10.33005/hms.v3i4.397>

Kasim, N. (2021). Global recognition of Malaysia's halal certification: The role of JAKIM. *Journal of Halal Studies*, 5(2), 77–89. <https://doi.org/10.22452/jhs.vol5no2.5>

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024). *Laporan perkembangan ekonomi syariah Indonesia 2024*. Jakarta: KNEKS.

Lubis, N. M. F., & Abdullah, R. (2020). Halal economic: Challenges and emerging opportunities in Malaysia. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 1(1), 45–60. <https://doi.org/10.24191/jipsf.v1i1.3881>

Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.

Pratiwi, D. (2023). Kawasan industri halal sebagai katalisator ekspor produk halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 9(1), 112–125. <https://doi.org/10.24235/jesb.v9i1.4567>

Ramadhan, A. (2022). Halal supply chain management: Tantangan dan peluang di Indonesia. *Jurnal Logistik dan Rantai Pasok Halal*, 4(2), 89–102. <https://doi.org/10.21009/jlrph.v4i2.223>

Sari, R., & Yuliani, T. (2021). Analisis daya saing industri halal Indonesia dalam perspektif global. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 201–215. <https://doi.org/10.20885/jei.vol12.iss3.art2>

State of the Global Islamic Economy Report. (2024/2025). *Thriving in uncertainty*. Dubai: DinarStandard & Salaam Gateway.

Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>

Wilson, J. A. J. (2014). The halal phenomenon: An extension or a new paradigm? *Social Business*, 4(3), 255–271. <https://doi.org/10.1362/204440814X14103454934294>

Wulandari, S. (2023). Digitalisasi industri halal di Indonesia: Blockchain dan IoT sebagai pendorong daya saing. *Jurnal Teknologi dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 134–148. <https://doi.org/10.21009/jtes.v5i2.567>